

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 5 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan konsep otonomi daerah. Otonomi daerah mengandung makna bahwa pemerintah pusat mendesentralisasikan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang diberlakukan. Pembagian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing. Salah satu urusan pemerintah pusat yang didesentralisasikan ke pemerintah daerah adalah urusan dalam bidang pendidikan. Esensi desentralisasi pendidikan adalah bahwa daerah otonom memiliki tugas dan fungsi, kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar dalam penyelenggaraan pendidikan Slamet, (2007: 3). Tujuan utama desentralisasi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan akan layanan yang prima yaitu pemerataan kesempatan, mutu, efisiensi, dan relevansi pendidikan sehingga mutu pendidikan semakin meningkat.

Sejalan dengan digulirkannya desentralisasi dalam bidang pendidikan maka pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kemendikbud mewajibkan setiap lembaga pendidikan sekolah menerapkan manajemen berbasis sekolah. Menurut

Depdiknas, tujuan Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia di sekolah.

Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah sejalan dengan tanggungjawab pemerintah, sekolah, dan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah berarti sekolah memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan pendidikan harus melibatkan seluruh *stakeholders* sekolah. Salah satu *stakeholders* sekolah adalah komite sekolah. Peran komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk untuk peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan. Peran komite sekolah adalah memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan (Kemendiknas No. 044/U/2002). Keberadaan komite sekolah yang diharapkan bukan menjadi sebuah formalitas namun memiliki komitmen dan loyalitas terhadap peningkatan kualitas pendidikan (Sagala, 2009: 314). Peran komite sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan dan tidak hanya memberikan bantuan berwujud material, namun juga bantuan berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan sekolah. Panji, (2004) melalui penelitiannya telah membuktikan adanya pengaruh positif peran komite sekolah terhadap meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

Sehubungan dengan tujuan Manajemen Berbasis Sekolah seperti yang telah dikemukakan oleh Depdiknas, beberapa hasil penelitian telah membuktikan bahwa:

1) Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah mampu menunjang tercapainya program sekolah (Soiran, 2014); 2) implementasi manajemen berbasis sekolah yang akuntabel, partisipatif, fleksibel, dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap layanan mutu pendidikan (Tansiri, 2018); 3) Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah yang didukung oleh input dan proses yang baik mampu mewujudkan prestasi belajar peserta didik yang membanggakan sekolah baik dalam bidang akademik maupun non akademik (Sukarti & Wibowo, 2013).

Manajemen Berbasis Sekolah akan meningkatkan mutu pendidikan, apabila dikelola dengan baik. Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah merupakan praktik fungsi manajemen sehingga di dalamnya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengevaluasian. Pengelolaan manajemen yang baik harus direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan, dimonitoring dan di evaluasi.

Mengenai penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam implementasi Manajemen Berbasis Sekolah telah diteliti oleh Febril dan Sahroni di lokasi penelitian yang berbeda. Febril, (2007) mengemukakan bahwa: 1) perencanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SMPN 3 Tanjung Raja meliputi perumusan tujuan, pengambilan keputusan, dan keterlibatan pihak sekolah; 2) pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah melibatkan guru, staf tata usaha, komite sekolah, waka kurikulum dan siswa untuk lebih memperhatikan pendidikan; 3) monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil kerja dan evaluasi guru serta staf pemantauan proses pembelajaran. Sahroni, (2018) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa: 1) Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dilaksanakan dengan baik harus melalui

proses manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; 2) pelaksanaan Manajemen Berbasis sekolah yang baik, harus menggunakan prinsip dasar manajemen berbasis sekolah yaitu, kerja sama, fleksibilitas, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Arif, (2013) dalam penelitiannya menemukan bahwa strategi perencanaan yang dirancang dengan baik dan diimplementasikan sesuai dengan yang telah disusun menunjukkan hasil yang signifikan di berbagai bidang pendidikan, peran guru di masyarakat, kegiatan belajar mengajar, kurikulum, dan sarana prasarana.

Febril, (2007) juga menemukan bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 3 Tanjung Raja Lampung Utara berjalan baik. Perencanaan dilaksanakan melalui perumusan tujuan. Pengorganisasian melibatkan kontribusi dari pihak sekolah dan komite sekolah. Pelaksanaan melibatkan semua pihak sekolah dan komite sekolah. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengadakan rapat setiap bulan. Faktor pendukung dan penghambat ialah otonomi sekolah, kepemimpinan, sarana prasarana dan partisipasi masyarakat.

Manajemen Berbasis Sekolah telah dilaksanakan di sekolah-sekolah di Indonesia selama hampir dua dasawarsa, namun kenyataannya masih banyak sekolah yang belum mampu melaksanakannya sesuai dengan ketentuan. Depdiknas (2009: 31-32) mengemukakan beberapa faktor penyebab belum berhasilnya implementasi Manajemen Berbasis Sekolah, yaitu 1) para pemangku kepentingan (*stakeholders*) belum memahami konsep manajemen berbasis sekolah secara utuh dan benar; 2) pertimbangan terhadap perubahan karena kepentingan, ketidakmampuan secara teknis

dan manajerial sekolah dan dinas pendidikan; 3) kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (kemandirian, kerjasama, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas); 4) pemangku kepentingan sekolah belum berpartisipasi secara optimal; dan 5) belum optimalnya tim dalam menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah.

Beberapa hasil penelitian di lapangan juga memperkuat pernyataan Depdiknas tersebut, yaitu 1) Manajemen Berbasis Sekolah telah dilaksanakan tetapi komitmen warga sekolah masih sangat rendah, ketersediaan dokumen perencanaan sekolah belum memadai, dokumen sekolah tidak mendukung, dokumen program kegiatan sekolah masih kurang dalam penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (Hasan, Lukman, & Hakin, 2018); 2) ketersediaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional (Marisa, 2006); 3) upaya peningkatan SDM tenaga kependidikan masih terbatas (Tamsil, 2010).

Marselinus, dkk. (2015) juga menemukan bahwa pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di Gugus IV Sekolah Dasar di Kecamatan Langke Rembong mengalami sejumlah hambatan yaitu: 1) fasilitas yang sangat terbatas; 2) SDM pendidik yang masih rendah; 3) ketidaksamaan persepsi mengenai komitmen pendidik terhadap peningkatan mutu pendidikan; 4) lemahnya kemauan belajar peserta didik; dan 5) minimnya daya dukung orang tua.

Permasalahan dalam pencapaian visi, misi sumber daya manusia untuk Bangsa adalah pendidikan. Pendidikan adalah salah satu input penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan ditujukan sepenuhnya untuk peningkatan kualitas dan kapasitas penduduk (manusia). Pembangunan di bidang pendidikan selain untuk menggerakkan roda pembangunan, juga merupakan investasi bagi kemajuan suatu Bangsa. Permasalahan yang dalam mewujudkan misi pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan yaitu: 1) Rendahnya kualitas dan akses pendidikan disebabkan: a) rendahnya kualitas pendidikan; b) terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan; c) rendahnya kualitas tenaga pendidik; d) rendahnya kualitas pengelolaan sistem pendidikan; e) terbatasnya biaya pendidikan; f) kurangnya Sarana dan prasarana; g) kurangnya tenaga pendidik, h) terbatasnya kemampuan peserta didik; i) kurangnya keterampilan dan pengetahuan, j) kurangnya peran serta masyarakat.

SMPN 2 Amarasi Timur adalah salah satu sekolah yang telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dalam rangka memperoleh data awal penulis mendapatkan informasi bahwa Sekolah belum mempunyai: 1) Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM); 2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang terdokumentasi dengan baik. Dengan belum dimiliki kedua rencana kerja tersebut sesungguhnya mencerminkan bahwa sekolah juga belum mempunyai pedoman dalam menyelenggarakan Manajemen Berbasis Sekolah. Jika sekolah tidak memiliki perencanaan kegiatan yang baik, maka secara otomatis

implementasi Manajemen Berbasis Sekolah tidak berjalan dengan baik. Selain itu, penulis juga memperoleh informasi awal bahwa keterlibatan *external stakeholder* baru sebatas anggota komite sekolah.

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah akan lebih berhasil apabila didukung oleh guru yang berkualitas, namun realita menunjukkan bahwa kualifikasi guru di SMPN 2 Amarasi Timur juga belum sejalan dengan amanat dalam Standar Nasional Pendidikan. Kondisi guru SMP 2 Amarasi Timur dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Jumlah Tenaga Pendidik Sesuai Status, Kualifikasi dan Rata-rata Mengajar

No	Status	Kualifikasi/Sertifikasi			Rata-rata Lama Tahun Mengajar	Jumlah Guru
1	PNS	S1	1	1	10 Tahun	3
2	Kontrak	S1	1	1	3 Tahun	1
3	Honorar	S1	-	-	5 Tahun	10
Jmlh				2	18 Tahun	14

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha SMP N 2 Amarasi Timur

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 14 guru, 3 di antara status PNS, 1 memiliki sertifikasi, 10 orang guru Honorar, kontrak daerah 1 orang dan juga memiliki sertifikasi pendidik.

Seperti yang diketahui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengatakan bahwa sebagai tenaga pendidik (Guru Professional) harus memiliki sertifikasi pendidik, tetapi pada kenyataan di SMPN 2 Amarasi Timur belum semua guru

memiliki sertifikasi pendidik. Masa kerja guru biasanya mencerminkan seberapa besar akumulasi pengalamannya dalam bidang pendidikan di tempat kerjanya, yang selanjutnya juga akan berdampak pada kemampuannya dalam menyumbangkan berbagai pemikiran untuk peningkatan mutu sekolahnya.

Disamping itu, SMPN 2 Amarasi Timur juga belum mempunyai guru Matematika, guru PKN, dan guru Seni Budaya. Tetapi diberikan tugas tambahan kepada guru yang bukan bidang mata pelajarannya. Hal ini nampaknya kemudian berdampak pada rendahnya mutu pendidikan seperti tercermin pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2

Rata-Rata Nilai Ujian Semester Siswa Kelas VIII

Tahun	BI	Mate	Bingris	Biologi	Eko	PPKn	SB
2018/2019	55,46	53,57	53,43	54,50	57,45	53,45	50,00
2019/2020	56,43	52,98	55,56	64,60	56,50	52,00	50,24

Sumber: Dokumentasi Tata Usaha SMPN 2 Amarasi Timur

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa nilai ulangan peserta didik kelas VIII SMPN 2 Amarasi Timur dalam dua tahun terakhir masih rendah atau dengan kata lain tidak mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 75,0.

SMPN 2 Amarasi Timur, didirikan pada Tahun 2008, dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan dapat dilihat dari sarana prasarana, akses jalan dari kota ke kabupaten dan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat maupun daerah. Dengan kekurangan dan keterbatasan sehingga Manajemen Berbasis Sekolah belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan pengamatan, penulis juga memperoleh data bahwa sarana dan prasarana yang menjadi salah satu faktor penentu peningkatan mutu pendidikan sebagai tujuan dari Manajemen Berbasis Sekolah masih minim. Trisnawati (2019) menyatakan bahwa proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi sarana-prasarana di SMPN 2 Amarasi timur dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3
Kondisi Sarana dan Prasarana Di SMPN 2 Amarasi Timur

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Kondisi
			Baik
2.	Ruangan Belajar	3	√
3.	Laboratorium IPA	1	√
4.	Ruang perpustakaan	-	-
5.	Ruang kepala Sekolah	-	-
7.	Ruang Wakasek	-	-
8.	Ruang BP/BK	-	-
9.	Ruang Guru, TU.	-	-

Sumber: SMP N 2 Amarasi Timur

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa ruangan penunjang kegiatan pembelajaran seperti laboratorium dan perpustakaan belum tersedia. Sekolah juga tidak memiliki ruang kepala sekolah, ruang wakasek, dan ruang guru yang semuanya ini sangat mendukung proses kerja yang maksimal dan di samping juga dibutuhkan untuk duduk bersama dan mendiskusikan segala sesuatu yang berhubungan dengan upaya meningkatkan kualitas sekolah.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah mengenai implementasi Manajemen Berbasis Sekolah sebagaimana telah dideskripsikan dan hasil-hasil penelitian tentang keberhasilan implementasi Manajemen Berbasis Sekolah maupun yang belum berhasil di beberapa lokasi penelitian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 2 Amarasi Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 2 Amarasi Timur?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Manajemen Berbasis Sekolah di SMP Negeri 2 Amarasi Timur?
3. Bagaimana solusi praktik Manajemen Berbasis Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 2 Amarasi Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menghasilkan sintesis tentang implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMPN 2 Amarasi Timur.
2. Untuk menghasilkan sintesis tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi Manajemen Berbasis Sekolah di SMPN 2 Amarasi Timur.
3. Untuk menemukan solusi praktik Manajemen Berbasis Sekolah sehingga meningkatkan mutu pendidikan di SMPN 2 Amarasi Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan penelitian adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan teoretik di bidang Manajemen Berbasis Sekolah.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi peneliti lain dalam mengkaji Ilmu Manajemen Pendidikan, khususnya Manajemen Berbasis Sekolah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Almamater: hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kepustakaan Magister Manajemen khususnya Konsentrasi Manajemen Pendidikan.

2. Bagi Sekolah: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk meningkatkan praktik Manajemen Berbasis Sekolah yang lebih sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional.
3. Bagi Guru: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi setiap guru agar mempunyai wawasan yang lebih luas mengenai keterlibatannya dalam praktik Manajemen Berbasis Sekolah di mana guru bertugas.
4. Bagi Penulis: hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah dalam bidang Manajemen Pendidikan.